



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/279/DPMPTSP/PAUD/XI/2022

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 2332/421.1/DISDIKBUD Tanggal 15 November 2022

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB PUSPA INDAH BENTENG DI DESA BENTENG KECAMATAN TOILI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : **KB PUSPA INDAH BENTENG**
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
3. Alamat : Desa Benteng Kecamatan Toili
4. Pengelola : **Ridayati**
5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Benteng

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **18 November 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 18 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. YINUS LEMBA KURAPA**  
Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 19670103 199303 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

KECAMATAN TOILI

DESA BENTENG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 02 / 42.1 / BTG / 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN ( PLAY GROUP )

PUSPA INDAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan program Kritis Anak Usia Dini ( PAUD ) memandang perlu didirikan Lembaga PAUD.

b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Benteng dengan Masyarakat Desa Benteng.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang PAUD berada dibawah Direktorat PAUD Ditjen PLS
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar sekolah.
5. Undang – Undang Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Permendikbud Nomor 84 Tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk sebuah Lembaga yang di beri nama Lembaga PAUD Kelompok Bermain PUSPA INDAH serta mengangkat Penyelenggara PAUD ( Terlampir ).

Kedua : Penyelenggaran PAUD dalam melaksanakan tugas berpedoman pada aturan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Benteng, 03 Januari 2009



Lampiran : SK Kepala Desa Benteng

Nomor : 02 / 42.1 / BTG / 2009

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RIDAYATI	KETUA PENGELOLA	
2	ISNA	SEKRETARIS	
3	NI KETUT JASI	BENDAHARA	

